

Disampaikan Dalam Simposium Nasional  
Forum Wacana Indonesia, 18 – 21 Nopember 2009  
Di Universitas Indonesia, Jakarta.

---

## **REFORMA AGRARIA:**

Strategi Perluasan Lapangan Kerja & Pengentasan Kemiskinan

Oleh:

Sutaryono

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Email: taryo\_jogja@yahoo.com

HP. 085866888506

### **Pendahuluan**

Persoalan ketenagakerjaan, ketersediaan lapangan kerja, pengangguran, dan kemiskinan adalah persoalan yang saling silang sengkurat dan menjadi beban luar biasa bagi pemerintah di masa krisis sampai sekarang. Tingginya tingkat pengangguran, sempitnya lapangan kerja dan tidak munculnya lapangan kerja baru menjadikan persoalan ketenagakerjaan bergeser menjadi persoalan kemiskinan. Disisi lain, masyarakat yang tidak tergolong sebagai pengangguranpun tidak cukup berdaya menghadapi berbagai tekanan hidup yang berupa semakin mahalnya harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Produktivitas rendah, pendapatan rendah, *saving* rendah dan investasi rendah- bahkan tidak ada sama sekali – inilah yang menjadi ciri masyarakat miskin.

Persoalan kemiskinan sebagaimana di atas diawali oleh persoalan pengangguran. Persoalan pengangguran disebabkan paling tidak oleh tiga hal yang meliputi masalah pasar kerja, tenaga kerja dan kesempatan kerja. Pasar kerja berhubungan dengan adanya unsur permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja. Tenaga kerja berhubungan dengan kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang tersedia. Sedangkan kesempatan kerja berhubungan dengan ketersediaan lapangan kerja. Dalam konteks ini, sebagai negara agraris, mungkinkah kebijakan reforma agraria menjadi satu strategi dalam penyediaan dan

perluasan lapangan kerja? Apabila mungkin, mampukah perluasan dan penyediaan lapangan kerja di sektor pertanian mengurangi angka kemiskinan? Pertanyaan inilah yang akan dielaborasi pada paper ini, mengingat pengalaman di berbagai negara – sebut saja Jepang, Taiwan, Korea Selatan, China dan Vietnam – telah berhasil mentransformasikan struktur agraria ke dalam suatu sistem pertanian individual yang mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Griffin, *et al.* 2002), bahkan menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan dalam proses industrialisasi (Kay, 2002). Tidak hanya di negara-negara Asia, negara-negara di Amerika Latin-pun telah sejak lama menerapkan kebijakan reforma agraria untuk memperbaiki struktur penguasaan lahannya, sebut saja Meksiko, Nikaragua, Honduras, Brazil, Ekuador dan Peru pada awal 1970an. Bahkan negara-negara seperti Bolivia, Kolumbia dan Venezuela, genderang reforma agraria masih bergaung hingga saat ini.

### **Kemiskinan dan Persoalan Ketenagakerjaan**

Kemiskinan adalah problem krusial bangsa ini- sebuah ironi yang sangat nyata di tengah kayanya bangsa dan negara Indonesia. Krusialnya permasalahan kemiskinan tidak terlepas dari sulitnya membangun terminologi kemiskinan itu sendiri, mengingat kemiskinan menyangkut berbagai macam dimensi. Menurut Ellis, sebagaimana dikutip oleh Effendi, (1995:249) dimensi kemiskinan dapat diidentifikasi menurut ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi, kemiskinan dapat dimaknai sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemiskinan sosial diartikan sebagai kekurangan jaringan sosial dan struktur sosial yang dapat menopang dalam mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas serta terdapatnya faktor-faktor penghambat bagi upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan. Kemiskinan politik dapat dimaknai bahwa adanya keterbatasan akses terhadap kekuasaan yang memungkinkan munculnya sebuah tatanan sosial yang berorientasi pada terdistribusinya sumberdaya secara merata.

Berbagai dimensi kemiskinan di atas pada akhirnya akan menyulitkan munculnya pengertian kemiskinan yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan. Dalam konteks ini pengertian kemiskinan sering dikategorikan ke dalam 4 (empat) macam, yang

meliputi kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Menurut Jamasy (2004:30-31) yang dimaksud dengan kemiskinan absolut adalah apabila sejumlah pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan relatif adalah kondisi yang menempatkan pendapatan seseorang berada di atas garis kemiskinan tetapi masih relatif lebih rendah dengan pendapatan masyarakat di sekitarnya. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat dan menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Kemiskinan kultural dimaknai sebagai sebuah kemiskinan yang disebabkan oleh kemalasan dalam berusaha, bersikap boros, tidak kreatif yang kesemuanya cenderung pada sikap hidup dan budaya masyarakat.

Kemiskinan di Indonesia tampaknya sudah cukup memprihatinkan. Data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Susenas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2006 mencapai 39,30 juta jiwa. Namun demikian menurut Tjondronegoro, pada tahun 2008 kalau kemiskinan diukur menggunakan kriterium Bank Dunia, di mana orang miskin adalah orang yang berpenghasilan di bawah USD 1,00 per Kepala Keluarga (KK), maka jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 20 juta. Tetapi apabila kriterium yang dipakai adalah angka Bank Dunia yang lain, yakni USD 2,00 per KK, maka jumlah penduduk miskin Indonesia pada saat ini mencapai 100 juta jiwa, atau hampir separuh (43,5%) jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 230 juta jiwa (Tjondronegoro, 2008:44).

Berdasarkan data yang dihimpun BPS di atas, jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan mencapai 24,81 juta jiwa (63,1%) dan di daerah perkotaan mencapai 14,49 juta jiwa atau 36,9% (Heriawan, 2006). Apabila dihitung berdasarkan jumlah Rumah Tangga Miskin, terdapat 19,1 juta Rumah Tangga Miskin di negeri yang kaya ini. Ironis memang. Berdasarkan data tersebut, 63,1% penduduk miskin berada di wilayah perdesaan. Lebih dari itu, 72% dari jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Ini

adalah data yang berhubungan dengan jumlah penduduk miskin perdesaan yang gantungan hidupnya dari sektor pertanian.

Di sisi yang lain, di seluruh Indonesia terdapat 13,253 juta Rumah Tangga Pertanian yang hanya menguasai (belum tentu memiliki) luas bidang tanah kurang dari 0,5 hektar (Heriawan, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan tanah oleh rumah tangga petani sangat memprihatinkan, karena sebagian besar petani kita adalah petani gurem. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh petani di Pulau Jawa, tetapi juga petani di luar Pulau Jawa. Sebagai contoh 74 dari 100 rumah tangga petani di Jawa adalah petani gurem, di Kalimantan petani gurem mencapai 28%, dan di Sulawesi mencapai 31,05% dari seluruh rumah tangga petani (Heriawan, 2006). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani di negeri ini dapat dikatakan 'lapar tanah'.

Persoalan kemiskinan dan kelangkaan sumberdaya lahan bagi petani sebagaimana di atas sangat erat dengan persoalan ketenagakerjaan. Keterbatasan lahan garapan bagi angkatan kerja di perdesaan semakin meningkatkan angka pengangguran. Hal ini telah disinyalir cukup lama sebagai permasalahan ketenagakerjaan yang paling utama, yakni persediaan tenaga kerja lebih besar dari kebutuhan tenaga kerja. Wujud dari permasalahan tersebut berupa: (a) pengangguran dan setengah pengangguran; (b) kemiskinan; dan (c) keterbelakangan (Suroto, 1992). Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak tertampungnya angkatan kerja pada lapangan kerja yang tersedia menjadi penyebab utama pengangguran, yang pada akhirnya bermuara pada kemiskinan dan keterbelakangan.

Berdasarkan hasil Sakernas 2006, yang dihitung oleh Kasto (2007) terdapat sejumlah 106,3 juta angkatan kerja di Indonesia. Dari sejumlah itu terdapat 11,1 juta jiwa (10,4%) pencari kerja atau sering disebut juga sebagai pengangguran terbuka. Jumlah tersebut terdistribusi di perdesaan sebesar 5,28 juta jiwa (47,6%) dan di perkotaan sebesar 5,82 juta jiwa (52,4%). Jumlah pengangguran ini akan bertambah menjadi 41 juta orang, apabila digabung dengan angkatan kerja yang statusnya setengah pengangguran (bekerja tidak penuh) yang berjumlah 29,9 juta jiwa (23 juta jiwa berada di perdesaan dan 6,9 juta jiwa ada di perkotaan). Jumlah pengangguran dan setengah pengangguran ini, ternyata mencapai 38,57% dari seluruh angkatan kerja yang tersedia. Sejumlah 41 juta orang pengangguran

(terbuka dan setengah pengangguran) ini adalah persoalan yang cukup berat bagi bangsa Indonesia.

Data ketenagakerjaan tersebut apabila dibandingkan dengan data kemiskinan sebagaimana diungkap terdahulu, ternyata cukup relevan. Pada tahun 2006, penduduk miskin di Indonesia mencapai 39,30 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 24,81 juta jiwa (63,1%) berada di wilayah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan dan persoalan ketenagakerjaan cukup dominan di wilayah perdesaan (tabel 1). Artinya, penyediaan lapangan kerja di perdesaan yang berhubungan dengan sektor pertanian layak dikedepankan untuk penyelesaian masalah pengangguran.

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Kemiskinan dan Jumlah Pengangguran di Wilayah Perdesaan & Perkotaan Th. 2006

No	Kemiskinan Dan Pengangguran	Jumlah Total (juta)	Wilayah			
			Perdesaan		Perkotaan	
			Jumlah (juta)	%	Jumlah (juta)	%
1	Penduduk Miskin	39,30	24,81	63,1	14,49	36,9
2	Rumah Tangga Miskin	19,10	12,05	63,1	7,05	36,9
3	Pengangguran Terbuka	11,10	5,28	47,6	5,82	52,4
4	Setengah Pengangguran	29,90	23,00	76,9	6,90	23,1
5	Pengangguran (3+4)	41,00	28,28	68,9	12,72	31,1

Sumber: Heriawan (2006), Kasto (2007) dan modifikasi

Di sisi yang lain, meningkatnya produksi beras secara nasional pada tahun 2005 – 2008, dan terbebasnya impor beras pada tahun 2008 (Setneg, 2008) yang kemudian diklaim sebagai keberhasilan swasembada beras, belum berarti meningkatnya kesejahteraan petani. Karena senyatanya swasembada beras itu tidak mungkin terjadi karena pupuk yang langka, benih unggul *sulapan*, irigasi mangkrak, harga gabah pas-pasan, *mandeg*-nya penyuluhan pertanian, penggundulan

hutan (Maksum, 2009) maupun penguasaan lahan pertanian yang sangat sempit bagi petani di perdesaan. Pada konteks inilah reforma agraria perlu mendapatkan perhatian, agar negeri agraris ini dapat mewujudkan swasembada beras sekaligus dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

### **Reforma Agraria & Penyediaan Lapangan Kerja**

Reforma Agraria adalah suatu penataan ulang atau restrukturisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber – sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani dan rakyat kecil pada umumnya ketika terdapat ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber – sumber agraria di negeri yang konon disebut agraris ini. Reforma agraria ini juga diorientasikan untuk menciptakan lapangan kerja di bidang agraria (*land base*) dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam konteks ini dapat dimaknai bahwa reforma agraria atau sering disebut juga sebagai pembaruan agraria adalah upaya penataan kembali penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan sumberdaya agraria untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan struktur dan distribusi penguasaan sumberdaya agraria termasuk di dalamnya adalah sumberdaya lahan. Namun demikian reforma agraria tidak cukup diletakkan pada konteks keterbatasan akses masyarakat atas sumberdaya agraria tetapi lebih luas lagi pada persoalan kelangsungan dan keberlanjutan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terbukanya akses masyarakat terhadap sumberdaya agraria sama sekali belum bisa menjamin terjadinya perubahan menuju kesejahteraan apabila kebijakan pembangunan tidak memberikan peluang bagi keberlangsungan usaha masyarakat atas sumberdaya agraria.

Reforma Agraria yang disebut pula sebagai pembaruan agraria ini perlu segera diformulasikan menjadi sebuah agenda aksi yang dapat diimplementasikan. Dalam konteks ini pemerintah tidak perlu ragu lagi untuk mengagendakan pembaruan agraria menjadi sebuah program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Landasan legal bagi pemerintah untuk segera melaksanakan pembaruan agraria sudah ada sejak

diterbitkannya Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dalam ketetapan tersebut diamanahkan bahwa pembaruan agraria mencakup suatu proses berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria. Hal tersebut dimaksudkan bahwa pembaruan agraria harus diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Amanah tersebut mensyaratkan kepada penyelenggara negara untuk menjabarkannya ke dalam berbagai kebijakan yang memungkinkan untuk dioperasionalkan oleh segenap pemangku kepentingan di bidang keagrariaan.

Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono- yang terpilih kembali untuk jabatan berikutnya - telah memberikan komitmen seluas 8,15 juta hektar lahan untuk diorientasikan pada Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Momentum ini menjadikan program pembaruan agraria menjadi satu program bersama bangsa ini yang harus diperjuangkan dan didesakkan pada pengambil kebijakan untuk segera diimplementasikan. Berkaitan dengan hal ini pertanyaan yang mengedepan adalah apa urgensinya reforma agraria dalam penyediaan lapangan kerja?

Pertanyaan tersebut paling tidak dapat didekati dengan tujuan reforma agraria yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian berbagai permasalahan bangsa Indonesia. Beberapa tujuan reforma agraria yang dapat dikedepankan adalah:

1. menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah ke arah yang lebih adil;
2. mengurangi kemiskinan;
3. menciptakan lapangan kerja;
4. memperbaiki akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi, terutama tanah;
5. mengurangi sengketa dan konflik pertanahan;
6. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup;
7. meningkatkan ketahanan pangan.

(BPN, 2007)

Berbagai tujuan tersebut terkait satu sama lain. Dalam konteks ini tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja adalah hal yang paling urgen untuk dielaborasi lebih jauh.

Kondisi riil bangsa Indonesia menunjukkan bahwa: (1) bangsa Indonesia adalah bangsa agraris; (2) sebagian besar penduduknya tinggal di perdesaan dan bergerak di sektor pertanian; (3) angka kemiskinan yang tinggi terdapat di perdesaan; (4) angka pengangguran (pengangguran terbuka dan setengah pengangguran) sebagian besar terdapat di perdesaan. Kondisi ini mengharuskan pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan dan berbasiskan pada sektor agraris.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pertanian telah menyusun "Rencana Aksi Pemantapan Ketahanan Pangan 2005-2010" berupa arah pengembangan dan sasaran lima komoditas pangan utama, yang meliputi:

1. Padi/beras : Mempertahankan swasembada berkelanjutan
2. Jagung : Menuju swasembada tahun 2007 dan daya saing ekspor tahun 2008 dan seterusnya.
3. Kedelai : Akselerasi peningkatan produksi untuk mengurangi ketergantungan impor (2010 rasio produksi terhadap kebutuhan 65%, swasembada dicapai tahun 2015).
4. Gula : Menuju swasembada berkelanjutan mulai tahun 2009
5. Daging sapi : Akselerasi peningkatan produksi untuk mengurangi ketergantungan impor dan pencapaian swasembada tahun 2010.

Rencana Aksi Pemantapan Ketahanan Pangan tersebut telah dilengkapi dengan beberapa langkah strategis untuk mencapai sasaran yang diharapkan meliputi:

1. Mengidentifikasi potensi lahan yang sesuai untuk pengembangan komoditas padi, jagung, kedelai, tebu dan sapi potong.
2. Merenovasi dan memperluas infrastruktur fisik dengan merehabilitasi jaringan irigasi lama dan membangun jaringan irigasi baru untuk pengembangan lahan sawah di luar Jawa serta membuka lahan pertanian baru, khususnya lahan kering di Luar Jawa.

3. Menahan laju konversi lahan sawah di Jawa melalui penetapan "lahan abadi" untuk usaha pertanian.
4. Mempercepat penemuan teknologi benih/bibit unggul untuk peningkatan produktivitas, teknologi panen untuk mengurangi kehilangan hasil, dan teknologi pasca panen serta pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah.
5. Mempercepat pembentukan teknologi spesifik lokasi kelima komoditas tersebut untuk meningkatkan daya saingnya.
6. Membangun sistem perbenihan/pembibitan untuk kelima komoditas tersebut.
7. Memberikan subsidi sarana produksi untuk usaha primer sekaligus memberikan proteksi kepada kelima komoditas tersebut.
8. Merevitalisasi sistem penyuluhan dan kelembagan petani untuk mempercepat difusi adopsi teknologi yang mampu meningkatkan produksi dan pendapatan petani.
9. Mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian yang mampu mendistribusikan produk dan return/keuntungan secara efisien dan adil.
10. Mengembangkan sistem pembiayaan pertanian, termasuk keuangan mikro pedesaan untuk meningkatkan aksesibilitas petani atas sumber permodalan/pembiayaan pertanian.
11. Memberikan insentif berinvestasi di sektor pertanian, khususnya di luar Jawa, termasuk menyederhanakan proses perizinan investasi di sektor pertanian.
12. Memperjuangkan komoditas padi, jagung, kedelai dan tebu sebagai komoditas strategis dalam perundingan W.T.O.

Strategi tersebut tidak akan dapat diimplementasikan secara baik apabila tidak didukung dengan kebijakan nasional yang mengikat bagi institusi atau departemen terkait. Kebijakan yang parsial hanya akan memboroskan keuangan negara yang ujungnya tidak mampu menyediakan lapangan kerja bagi pengangguran secara berkelanjutan, khususnya di wilayah perdesaan dan berbasis lahan.

Dalam konteks paper ini dapat dijelaskan bahwa kemiskinan dan pengangguran di wilayah perdesaan adalah kemiskinan dan pengangguran bagi penduduk dan tenaga kerja pada sektor pertanian. Kemiskinan dan pengangguran disini berhubungan dengan penguasaan dan pemilikan atas lahan pertaniannya. Ketika lahan pertanian sudah

diorientasikan untuk kepentingan non pertanian pada skala yang lebih luas melalui kebijakan makro, maka meningkatnya jumlah petani miskin menjadi sebuah keniscayaan. Untuk itu perlindungan terhadap keberadaan lahan-lahan pertanian harus dilakukan, terutama melalui kebijakan yang berorientasi pada usaha-usaha pertanian. Hal ini sebagaimana gagasan Keith Griffin, et al (2002) dalam *Poverty and Distribution of Land* tentang perlunya mengevaluasi kebijakan dan praktek yang cenderung bias kota, karena hanya mempertahankan kemiskinan. Lebih lanjut Griffin mengedepankan pentingnya pendistribusian lahan kepada petani untuk memerangi *urban bias policies* tersebut. Gagasan Griffin tersebut menunjukkan bahwa perkembangan wilayah yang mengokupasi lahan-lahan pertanian di wilayah pinggiran kota adalah salah satu praktek yang bias kepentingan kota dan cenderung memberikan implikasi pada proses pemiskinan petani.

Kebijakan pengembangan lahan pertanian yang berasal dari tanah-tanah terlantar ataupun berasal dari kawasan hutan yang tidak produktif dan secara ekologis tidak mengganggu keseimbangan alam layak dijadikan prioritas. Peluang inilah yang akan diambil melalui kebijakan dan program reforma agraria dalam rangka penyediaan dan pengembangan lapangan kerja di wilayah perdesaan.

Statemen Presiden yang akan mengalokasikan sejumlah 8,15 juta hektar untuk program reforma agraria menjadi satu titik tolak dalam perluasan lapangan kerja. Apabila dihitung, kebutuhan petani untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum sekitar 2 ha. Itu berarti bahwa 8,15 juta hektar dapat diorientasikan untuk sekitar 4,075 juta petani ataupun kepala rumah tangga petani. Jumlah yang cukup fantastik, dibanding lapangan kerja baru yang hanya mampu menyerap 48.000 tenaga kerja pada pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada tahun 2006 (Bappenas, 2006). Apabila strategi tersebut dapat berhasil, ternyata mampu mengurangi pengangguran sekaligus angka kemiskinan hampir 25% dari jumlah kepala rumah tangga miskin yang ada di Indonesia saat ini. Inilah barangkali tantangan bagi pelaksanaan reforma agraria dalam upaya penyediaan lapangan kerja dan mengatasi pengangguran.

## Penutup

Gagasan Keith Griffin, et al (2002) dalam *Poverty and Distribution of Land* tentang perlunya mengevaluasi kebijakan dan praktek yang cenderung bias kota, karena hanya mempertahankan kemiskinan dan dikedepankannya pendistribusian lahan kepada petani untuk memerangi *urban bias policies* tersebut menjadi sangat layak untuk diperbincangkan lebih jauh. Tidak sekedar sebatas pada level wacana, tetapi harus dapat diimplementasikan pada level operasional sebagai sebuah agenda aksi. Kiranya strategi penyediaan dan pengembangan lapangan kerja baru yang berorientasi untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan melalui reforma agraria layak dan sangat perlu untuk diperjuangkan. Semoga.

## DAFTAR BACAAN

- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2005. *Rencana Aksi Pemantapan Ketahanan Pangan 2005-2010*. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Badan Pertanahan Nasional, 2007. *Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*. BPN. Jakarta.
- Baranyi, Stephen et al. 2004. *Scoping Study on Land Policy Research in Latin America*. The North-South Institute dan IDRC (CRDI), Ottawa
- Effendi, Tadjudin Noer, 1995. *Sumberdaya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Griffin, Keith. et al. 2002. "Poverty and the Distribution of Land". *Journal of Agrarian Change*. Vol 2 No. 3, July 2002.
- Heriawan, 2006. *Implementasi Reformasi Agraria Dari Perspektif Dukungan Penyediaan Data dan Informasi Statistik*. Makalah pada Simposium Agraria Nasional, 4 Desember 2006 di Makasar.
- Jamasy, Owin, 2004. *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Belantika. Jakarta.

- Kay, Cristóbal, 2002. "Why East Asia Overtook Latin America: Agrarian Reform, Industrialisation and Development" dalam *Third World Quarterly* 23(6): 1073-1102.
- Maksum, Mochammad. 2009. "Memantapkan Pilihan Nahdliyyin" dalam *SKH Kedaulatan Rakyat*, 3 April 2009 hal 12.
- Suroto, 1992. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Tjondronegoro, 2008. *Negara Agraris Ingkari Agraria: Pembangunan Desa dan Kemiskinan di Indonesia*. Yayasan AKATIGA. Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Mencari Ilmu di Tiga Jaman Tiga Benua*. Sajogja Institute. Bogor.